

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam aspek Pembukuan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016, dimana telah dilaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang menurut golongan dan kodefikasi barang serta dimasukkan kedalam Daftar barang Pengguna.
2. Penatausahaan inventarisasi barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Penatausahaan laporan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dinas Pendidikan membuat laporan sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No.19 Tahun 2016. Laporan aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai Dinas Pendidikan dibuat sebagai bahan penyusun neraca laporan keuangan SKPD, dengan catatan adanya kekurangan daftar rincian perolehan barang yang berasal

dari Dana BOS 2017 yang merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan dan dilengkapi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Nusa sebagai dukungan terhadap akuntabilitas dari laporan keuangan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan laporan aset tetap harus dibuat secara lengkap dan terperinci. Adanya kekurangan daftar rincian perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Dana BOS merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan dan dilengkapi oleh pihak Dinas Pendidikan.
- b. Dapat dipertimbangkan penambahan jumlah dan kualitas tenaga/staff dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan yang dapat membantu pengurus barang pengguna agar tidak terjadi kekurangan ataupun keterlambatan dalam pembuatan laporan sebagai dukungan terhadap akuntabilitas dari laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlina. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2006. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tentang Aset Tetap.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Mhd. Habibi Arifin. 2011. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Monika Sutri Kolinug. 2016. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mursyidi. 2009. Akuntansi pemerintahan di Indonesia. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rasyidah Mustika. 2015. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Politeknik Negeri Padang.
- Siregar, Doly. (2004). Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.